E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 1722-1732
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola Berbasis Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Sumba Barat Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat

Gerson Uta Dappa Nokko[1], Josef Mario Monteiro[2] , Yonas S.O Benu[3]

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia.
E-mail: dappanokkogerson@gmail.com[1], josefmonteiro@staf.undana.ac.id[2], yonas.benu@staf.undana.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat secara normatif telah sejalan dengan tugas penyelenggaraan informasi publik. Namun, efektivitas operasionalnya belum optimal karena platform yang tersedia masih bersifat informatif statis sederhana, belum dilengkapi fitur interaktif, dan belum didukung oleh pangkalan data (*database*) terintegrasi. Faktor-faktor utama yang menghambat pelaksanaan sistem informasi tersebut meliputi: (1) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi jumlah tenaga ahli IT maupun pemahaman muatan budaya lokal; (2) keterbatasan anggaran dan ketidakmerataan infrastruktur jaringan internet (*blank spot*); (3) kelemahan sistem pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual; (4) belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi lintas instansi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta lembaga adat; serta (5) rendahnya tingkat literasi digital dan kuatnya keterikatan masyarakat pada pola komunikasi tradisional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pengembangan platform pangkalan data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sinergi kelembagaan dan sosialisasi kepada masyarakat guna mewujudkan efektivitas pengelolaan sistem informasi kebudayaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Sistem Informasi Budaya, Tradisi Pasola, Diskominfo, Sumba Barat.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the website-based Pasola Cultural Information System by the Department of Communication and Informatics of West Sumba Regency and identify the factors hindering its implementation based on West Sumba Regency Regional Regulation Number 28 of 2016. This study employs an empirical juridical method using socio-legal and conceptual approaches. Data were collected through observations, in-depth interviews with relevant informants, as well as literature and document studies. The findings indicate that the implementation of the website-based Pasola Cultural

Information System by the Department of Communication and Informatics of West Sumba Regency is normatively consistent with its public information responsibilities. However, its operational effectiveness remains suboptimal because the existing platform is still limited to basic static information, lacks interactive features, and is not supported by an integrated database. The main factors hindering the implementation of the information system include: (1) limited human resources, both in terms of the number of IT professionals and understanding of local cultural content; (2) budget constraints and unequal internet network infrastructure, including areas with no internet coverage (*blank spots*); (3) weaknesses in the data management system, which is still conducted manually; (4) suboptimal collaboration and coordination among agencies, particularly the Department of Communication and Informatics, the Department of Tourism and Culture, and traditional institutions; and (5) low levels of digital literacy and the strong attachment of local communities to traditional communication patterns. Therefore, strengthening technical regulations, developing an integrated database platform, improving the capacity of government personnel, and optimizing institutional cooperation and public outreach are necessary to ensure the sustainable and effective management of the cultural information system.

Keywords: *Legal Effectiveness, Cultural Information System, Pasola Tradition, Department of Communication and Informatics, West Sumba.*

LATAR BELAKANG

Keberagaman budaya yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia merupakan aset dan identitas nasional yang sangat bernilai serta wajib dipelihara, dijaga, dan dikembangkan di tengah gelombang globalisasi. Salah satu kearifan lokal yang memiliki nilai historis, filosofis, dan spiritual yang sangat signifikan adalah tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasola merupakan bagian dari ritual Marapu, yaitu kepercayaan leluhur masyarakat Sumba, berupa permainan ketangkasan dan pertarungan adat saling melempar lembing kayu dari atas kuda yang ditunggangi oleh dua kelompok masyarakat adat. Tradisi tahunan yang biasa diselenggarakan pada bulan Februari hingga Maret ini bertujuan untuk merayakan masa tanam padi, memohon keberkahan dan kesuburan tanah, serta menghormati para leluhur. Rangkaian ritual Pasola juga didahului oleh tradisi Pajura atau tinju adat massal yang berlangsung di tengah malam bawah cengkeraman malam dan cahaya bulan samar, di mana para petarung membelitkan alang-alang di tangannya sebagai pengganti sarung tinju. Tradisi ini tidak sekadar menjadi ritual spiritualitas lokal, melainkan telah berkembang menjadi simbol kebudayaan utama sekaligus daya tarik pariwisata yang memberikan dampak sosial dan ekonomi signifikan bagi daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menjadi suatu keharusan agar warisan budaya seperti Pasola dapat didokumentasikan, disebarluaskan, dan dipromosikan secara lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menunjukkan komitmen hukum dan politik dalam menjaga warisan budaya daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Peraturan daerah ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan data, pendokumentasian, dan pengembangan kebudayaan daerah secara terencana. Pelaksanaan kewenangan tersebut menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat pada posisi strategis sebagai sektor utama dalam penyelenggaraan sistem informasi berbasis elektronik. Pemanfaatan website sebagai media tata kelola pemerintahan digital atau e-government berfungsi penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi publik. Kehadiran situs web resmi kebudayaan idealnya bertindak sebagai media dokumentasi digital, sarana edukasi masyarakat, platform promosi pariwisata budaya, serta ruang partisipasi publik dalam menjaga keberlangsungan tradisi lokal.

Praktik pengoperasian sistem informasi budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat masih belum sepenuhnya berjalan

secara optimal. Pengelolaan sistem informasi kebudayaan di daerah kerap berhadapan dengan berbagai kompleksitas dan tantangan, baik dari segi keterbatasan regulasi teknis, infrastruktur teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun pola kolaborasi antarlembaga pemerintahan dan komunitas adat. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2016 serta regulasi mengenai kedudukan dan fungsi Diskominfo perlu diuji secara empiris untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan di lapangan telah sesuai dengan norma hukum yang dicita-citakan, yaitu das sollen berbanding das sein. Evaluasi yang mendalam terhadap efektivitas penerapan peraturan daerah ini menjadi penting guna memastikan pemanfaatan teknologi informasi benar-benar mampu mendukung pelestarian budaya lokal secara berkesinambungan.

Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan utama yang akan dikaji secara komprehensif. Permasalahan pertama adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016. Permasalahan kedua adalah apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem informasi budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan secara objektif efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua bentuk manfaat, yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan evaluatif bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, khususnya Diskominfo, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi budaya berbasis digital sesuai ketentuan perundang-undangan. Manfaat teoritis penelitian ini adalah menambah referensi akademik serta memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Kebijakan Publik mengenai pelaksanaan otonomi daerah, Keterbukaan Informasi Publik, dan penerapan e-government.

Tingkat keaslian atau novelty penelitian ini sangat tinggi karena secara khusus menganalisis efektivitas hukum dan kebijakan daerah terkait digitalisasi kebudayaan lokal Pasola melalui pendekatan yuridis empiris atau socio-legal. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik sejenis memiliki perbedaan fokus yang mendasar dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh M. J. Y. Konda pada tahun 2023 dengan judul "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pasola di Desa Pero Batang Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya" lebih menitikberatkan pada arti ritual, nilai spiritual, dan peran sosial budaya Pasola tanpa menyinggung keterlibatan pemerintah daerah dalam digitalisasi informasi. Penelitian yang ditulis oleh R. P. Nugraha pada tahun 2021 dengan judul "Pengembangan Sistem Informasi Kebudayaan Daerah Berbasis Web di Kabupaten Sleman" berfokus pada perancangan teknis basis data untuk cagar budaya tanpa menganalisis kerangka regulasi hukum daerah. Penelitian penulis secara tegas membedakan diri karena berfokus pada efektivitas pelaksanaan sistem informasi kebudayaan, fungsi Diskominfo, serta analisis faktor penghambatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016.

METODE

Penelitian ini menggunakan lokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat sebagai pusat pengamatan dan penggalian data empiris. Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah lingkungan masyarakat. Fokus pengkajian difokuskan pada efektivitas pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi budaya Pasola berbasis website serta identifikasi faktor-faktor penghambatnya. Aspek yang diteliti mencakup perencanaan dan pengolahan sistem informasi budaya Pasola

oleh instansi terkait, serta hambatan operasional yang meliputi aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kolaborasi antarinstansi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan *socio-legal* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *socio-legal* menggabungkan studi hukum normatif dengan kajian sosial guna memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis di atas kertas, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan bekerja dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis secara mendalam doktrin-doktrin dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur para ahli yang relevan dengan fokus penelitian mengenai otonomi daerah, kewenangan pemerintahan daerah, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Penentuan populasi, sampel, dan responden dilakukan secara terarah untuk memperoleh data yang akurat dan representatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat, bidang pengelolaan informasi publik, serta bidang layanan komunikasi publik. Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria dan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Responden penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat sebanyak 1 orang, unsur bidang pengelolaan informasi publik sebanyak 2 orang, unsur bidang layanan komunikasi publik sebanyak 2 orang, serta unsur masyarakat Kabupaten Sumba Barat sebanyak 10 orang.

Jenis dan sumber data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara mendalam dan pengamatan observasi lapangan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016, bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan karya ilmiah para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas di kantor dinas terkait, wawancara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada para responden, serta studi kepustakaan guna menelaah dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis guna menjamin validitas hasil penelitian. Pengolahan data melewati tahap penyuntingan (*editing*) untuk memeriksa kelengkapan data, pengkodean (*coding*) untuk memberikan simbol pada jawaban responden, tabulasi data guna menggambarkan hasil jawaban secara terstruktur, serta verifikasi untuk menguji keabsahan data. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara yuridis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan merinci data secara objektif untuk memberikan interpretasi rasional berdasarkan fakta empiris di lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Budaya Pasola Berbasis Website oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumba Barat

Pengembangan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat merupakan wujud nyata implementasi tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*) dalam upaya melestarikan tradisi lokal. Platform digital ini dirancang sebagai sarana pengumpulan, penyimpanan, serta penyebaran informasi terkait tradisi Pasola secara terstruktur. Eksistensi sistem informasi tersebut berakar pada landasan yuridis Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai unsur pembantu kepala daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dalam mengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi,

informatika, persandian, dan statistik. Regulasi daerah tersebut baru memberikan kerangka kewenangan yang bersifat umum dalam tata kelola informasi instansi, tanpa memuat norma teknis terperinci yang secara khusus mengatur pengelolaan sistem informasi kebudayaan lokal seperti budaya Pasola.

Ketiadaan pengaturan teknis yang spesifik menunjukkan adanya kekosongan norma operasional yang memandu pelaksanaan kebijakan di tingkat teknis. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat, Bapak Dedy Saba Ora, dalam wawancara tanggal 18 Februari 2026 menegaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2016 memang dijadikan dasar hukum umum penyelenggaraan sistem informasi berbasis website, namun belum mengatur secara khusus muatan sistem informasi budaya Pasola. Pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi sangat bergantung pada interpretasi dan inisiatif aparatur pelaksana tanpa pedoman baku. Kondisi ini memunculkan disparitas antara hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dan kenyataan praktik empiris (*das sein*), di mana keberadaan norma peraturan belum sepenuhnya menjamin efektivitas operasional tata kelola informasi budaya secara maksimal.

Dinas Komunikasi dan Informatika memegang posisi sentral sebagai aktor penyedia infrastruktur digital dan layanan publik, sementara substansi muatan kebudayaan Pasola berada di luar penguasaan mutlak instansi tersebut. Data dan informasi budaya Pasola bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta otoritas lembaga adat yang memiliki legitimasi kultural. Pola hubungan fungsional ini mencerminkan desentralisasi fungsional, di mana kewenangan didistribusikan berdasarkan sektor tugas masing-masing lembaga. Mekanisme koordinasi antarinstansi yang berjalan selama ini masih terbatas pada tataran pertukaran informasi insidental dan belum terintegrasi ke dalam satu sistem kerja sama yang berkelanjutan. Ketiadaan arsitektur sistem yang menyatukan proses pembuatan konten, manajemen data, dan distribusi informasi menyebabkan pengelolaan data Pasola berjalan secara sektoral. Teori kebijakan publik menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada kemampuan aktor kebijakan dalam membangun integrasi program dan sumber daya secara substantif, bukan sekadar koordinasi formal.

Langkah strategis awal telah ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui dorongan dokumentasi digital, penyediaan konten multimedia berupa foto dan video, serta publikasi melalui situs web resmi daerah. Pendekatan ini selaras dengan model *e-government* yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen transparansi, efisiensi, dan perluasan akses publik. Realitas operasional menunjukkan bahwa situs web pemerintah daerah masih beroperasi sebagai media informasi umum yang statis, belum dilengkapi fitur interaktif, dan belum bertransformasi menjadi platform berbasis pangkalan data (*database*) yang terstruktur. Perencanaan sistem informasi belum mencakup arsitektur jangka panjang dan standar manajemen data yang dinamis, sehingga proses pengumpulan informasi dari observasi lapangan maupun dokumentasi kegiatan masih dikelola secara manual oleh staf pengelola informasi publik, seperti disampaikan oleh Bapak Jamaludin Hs Bey selaku staf pengelola informasi publik pada 18 Februari 2026.

Pengelolaan data secara manual berdampak langsung pada lambatnya pembaruan informasi dan rendahnya tingkat konsistensi sajian data di situs web resmi. Informasi budaya Pasola disajikan secara parsial tanpa melalui sistem klasifikasi dan pengarsipan digital yang terpadu. Standar kualitas penyampaian informasi publik yang menuntut akurasi dan ketepatan waktu belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situs resmi pemerintah. Platform digital daerah yang memuat konten Pasola masih ditempatkan secara umum di bawah kategori pariwisata atau kebudayaan, sehingga struktur dan kedalaman muatan informasinya belum secara khusus merespons kebutuhan spesifik pengguna.

Tingkat pemanfaatan situs web oleh masyarakat Kabupaten Sumba Barat masih tergolong rendah sebagai sarana utama pencarian informasi kebudayaan. Masyarakat cenderung mengandalkan saluran komunikasi konvensional, interaksi langsung dengan tokoh adat, atau memanfaatkan platform media sosial yang dinilai lebih interaktif dan cepat diakses. Perspektif komunikasi publik menunjukkan bahwa efektivitas diseminasi informasi sangat

ditentukan oleh kesesuaian karakteristik media dengan kebiasaan khalayak. Website pemerintah yang bersifat satu arah dan formal kurang menarik minat masyarakat digital yang terbiasa dengan fleksibilitas komunikasi modern. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah serta penggunaan bahasa administratif yang terlalu formal turut memperlebar jarak pemahaman masyarakat terhadap informasi digital yang disajikan. Pemanfaatan sistem informasi budaya Pasola berbasis website di Kabupaten Sumba Barat telah berjalan sebagai bentuk pelayanan publik digital, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan regulasi teknis, pembangunan pangkalan data terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sinergi kelembagaan agar selaras dengan tujuan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2016.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola Berbasis Website
Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan sistem informasi budaya Pasola di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat dihadapkan pada persoalan mendasar yang mencakup aspek kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga ahli di bidang teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan digital yang profesional dan berkelanjutan. Minimnya jumlah staf yang memiliki keterampilan teknis khusus menyebabkan beban kerja dalam perawatan situs web, pengolahan data, serta pembaruan konten tidak dapat tertangani secara maksimal, sehingga berdampak langsung pada lambatnya perkembangan sistem informasi dan kurang optimalnya layanan publik.

Kondisi ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat secara keseluruhan berjumlah 28 pegawai yang terdistribusi ke dalam beberapa tingkat pendidikan formal. Berdasarkan data kepegawaian, mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 18 orang atau mendominasi sebesar 64,29 persen, diikuti oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sederajat sebanyak 8 orang atau sebesar 28,57 persen, serta pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 2 orang atau sebesar 7,14 persen, sementara tingkat pendidikan Diploma (D-III) tercatat nihil atau 0 persen. Komposisi data tersebut menunjukkan bahwa secara umum aparatur di instansi terkait telah memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup memadai. Bapak Jamaludin Hs Bey selaku staf pengelola informasi publik dalam wawancara tanggal 18 Februari 2026 mengemukakan bahwa kendala teknis pengelolaan situs web kebudayaan bersumber dari keterbatasan pegawai yang benar-benar memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi, minimnya anggaran pengembangan, serta tantangan digitalisasi data budaya yang sebagian besar masih bersifat lisan sehingga memerlukan ketelitian ekstra dalam proses validasi sebelum dipublikasikan.

Persoalan sumber daya manusia dalam tata kelola informasi kebudayaan tidak dapat dipandang secara sempit sebatas kekurangan tenaga ahli komputer semata. Manajemen sistem informasi kebudayaan memiliki karakteristik unik karena memadukan elemen teknologi dengan substansi muatan lokal yang sarat akan nilai historis, makna filosofis, dan kepekaan sosial. Perpaduan kompetensi teknis teknologi informasi dan pemahaman mendalam mengenai konteks budaya Pasola masih sangat terbatas di kalangan aparatur pengelola, sehingga penyajian informasi digital kerap kali belum mampu merepresentasikan substansi kebudayaan secara utuh dan akurat.

Kerangka teori pengelolaan sumber daya manusia sektor publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kapasitas aktor pelaksana, terutama menyangkut aspek kompetensi, profesionalisme, dan fleksibilitas adaptasi terhadap dinamika perubahan. Kebijakan yang telah dirumuskan secara ideal tidak akan mencapai sasaran optimal apabila tidak didukung oleh kesiapan kapasitas aparatur yang memadai. Pandangan serupa dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit bahwa efektivitas sistem informasi pemerintahan sangat bergantung pada kesiapan tenaga kerja pengelolanya sebagai pendorong utama fleksibilitas dan

keberlanjutan sistem. Minimnya tenaga terampil berimplikasi pada rendahnya kreativitas dan inovasi pengembangan konten digital, di mana pengelolaan situs web masih berjalan secara konvensional tanpa pemanfaatan fitur interaktif maupun ragam media penyajian yang lebih menarik bagi publik.

Infrastruktur Teknologi

Kendala infrastruktur teknologi dalam pengelolaan sistem informasi budaya Pasola tidak hanya berkisar pada ketersediaan fasilitas fisik semata, melainkan melibatkan keterbatasan dukungan anggaran daerah serta ketidakmerataan akses jaringan internet di berbagai wilayah. Bapak Jamaludin Hs Bey selaku staf pengelola informasi publik dalam wawancara tanggal 18 Februari 2026 mengungkapkan bahwa hambatan utama operasional instansi meliputi minimnya alokasi anggaran, keterbatasan pegawai berlatar belakang keahlian komputer, serta mobilitas pegawai terampil yang kerap dipindah-tugaskan sehingga menghambat kesinambungan perawatan sistem. Berbagai keterbatasan tersebut berimplikasi langsung pada belum optimalnya pengembangan fitur sistem, rendahnya kualitas pemeliharaan teknis perangkat lunak, serta minimnya inovasi dalam penyampaian muatan informasi digital.

Ketidakmerataan distribusi dan stabilitas jaringan internet di Kabupaten Sumba Barat menciptakan persoalan struktural yang menghambat akses publik terhadap situs web resmi pemerintah. Sejumlah wilayah di daerah tersebut menghadapi keterbatasan koneksi internet, sehingga masyarakat di kawasan tertentu mengalami kesulitan menjangkau layanan informasi digital yang disediakan oleh pemerintah daerah. Fenomena kesenjangan digital ini menunjukkan bahwa ketersediaan sistem informasi secara teknis belum menjamin pemerataan perolehan informasi bagi seluruh lapisan warga negara.

Tinjauan teori pengembangan teknologi pemerintahan yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit menekankan bahwa keberhasilan penerapan *e-government* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung, meliputi jaringan komunikasi dan perangkat teknologi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang merata, akses terhadap sistem informasi publik hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja, sehingga memicu ketimpangan informasi yang bertentangan dengan prinsip dasar pelayanan publik.

Keterbatasan infrastruktur dan jangkauan jaringan turut mendorong rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan situs web resmi kebudayaan Pasola. Bapak Tua Palla selaku unsur masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam wawancara tanggal 22 Februari 2026 menyatakan bahwa sebagian besar warga cenderung memilih sarana komunikasi alternatif seperti aplikasi media sosial Facebook atau interaksi tatap muka langsung karena dinilai jauh lebih mudah diakses dibandingkan situs web resmi pemerintah. Realitas empiris ini membuktikan bahwa hambatan infrastruktur tidak sekadar berdampak pada aspek teknis pengelolaan, melainkan turut membentuk pola perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Kerangka teori kebijakan publik dari Riant Nugroho menegaskan bahwa implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya pendukung berupa dana dan fasilitas yang memadai, di mana ketiadaan dukungan tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan kebijakan di tingkat operasional.

Lemahnya Pengelolaan dan Sistem Informasi

Kendala dalam tata kelola sistem informasi budaya Pasola tidak hanya bersifat teknis semata, melainkan berakar pada kelemahan fondasi pengelolaan data yang belum terorganisasi secara memadai. Bapak Jamaludin Hs Bey selaku staf pengelola informasi publik dalam wawancara tanggal 18 Februari 2026 menjelaskan bahwa pengelolaan data budaya Pasola masih dikelola secara manual melalui sosialisasi langsung di lingkungan masyarakat dan sekolah, karena belum tersedianya dukungan pangkalan data (*database*) yang terintegrasi. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data menjadi tidak efektif, sehingga informasi yang dihasilkan cenderung tidak konsisten serta sulit diperbarui secara berkala. Ketiadaan struktur pangkalan data digital menunjukkan bahwa sistem yang beroperasi saat ini belum memenuhi prinsip dasar integrasi data sebagai fondasi utama manajemen informasi modern.

Persoalan tata kelola data semakin kompleks ketika dihadapkan pada karakteristik muatan budaya Pasola yang sebagian besar masih hidup dalam bentuk tradisi lisan secara turun-temurun di tengah masyarakat dan lembaga adat. Proses peralihan data verbal menuju format digital menuntut tahapan verifikasi dan validasi yang ketat guna menjamin keakuratan serta keaslian substansi kebudayaan. Bapak Jamaludin Hs Bey menambahkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu yang relatif lama serta melibatkan lintas instansi, salah satunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk memvalidasi data sebelum dipublikasikan ke situs web resmi. Realitas ini merefleksikan bahwa digitalisasi kebudayaan bukan sekadar penerapan teknologi semata, melainkan sebuah proses kultural yang membutuhkan kehati-hatian tinggi agar nilai-nilai asli tradisi tetap terjaga.

Tinjauan teori sistem informasi dari Richardus Eko Indrajit menegaskan bahwa beroperasinya sistem informasi secara optimal mensyaratkan adanya pengelolaan data yang terencana, terhubung, serta berlandaskan prosedur baku, sehingga mampu menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Ketiadaan pangkalan data yang memadai menyebabkan data mentah kesulitan diubah menjadi informasi strategis untuk mendukung pelayanan publik maupun pengambilan keputusan. Kerangka teori kebijakan publik dari Riant Nugroho turut memperkuat pandangan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga bergantung pada kesiapan sistem pendukung operasionalnya. Kelemahan pada sistem manajemen data tersebut menjadi penghalang fundamental dalam mengoptimalkan fungsi situs web sebagai pusat informasi budaya Pasola yang efektif.

Kolaborasi Antarinstansi

Implementasi sistem informasi budaya Pasola berbasis website sangat bergantung pada efektivitas kerja sama lintas lembaga, mengingat pengelolaan informasi kebudayaan tidak dapat diemban oleh satu instansi secara mandiri. Pembagian peran menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada fungsi pengelolaan teknologi serta situs web, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada penyediaan data kebudayaan, serta lembaga adat sebagai pemegang otoritas sumber informasi nilai-nilai tradisi Pasola. Realitas praktis di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga tersebut belum berjalan optimal. Bapak Jamaludin Hs Bey selaku staf pengelola informasi publik dalam wawancara tanggal 18 Februari 2026 menjelaskan bahwa kendati kemitraan secara formal telah terjalin antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta lembaga adat, interaksi operasional yang terbangun masih terbatas pada koordinasi tingkat dasar berupa pertukaran informasi insidental tanpa didukung mekanisme kerja yang terencana dan berkelanjutan.

Keterbatasan pola koordinasi berimplikasi langsung pada keterlambatan arus pengiriman data budaya Pasola, sehingga proses pembaruan informasi pada situs web resmi tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu. Perbedaan prosedur, kepentingan, serta pendekatan antarinstansi turut memunculkan hambatan tersendiri dalam menyelaraskan manajemen data kebudayaan. Minimnya komunikasi formal maupun informal antarpihak menghambat proses verifikasi data yang melibatkan lembaga adat sebagai pemilik sah otoritas kultural, sehingga alur kerja operasional menjadi terpecah-pecah dan tidak efisien. Ketiadaan platform atau mekanisme koordinasi yang terintegrasi menyebabkan seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga publikasi masih dikerjakan secara sektoral dan terpisah oleh masing-masing pihak, yang pada akhirnya menurunkan tingkat konsistensi dan kualitas sajian informasi publik.

Tinjauan teori kebijakan publik dari Riant Nugroho menekankan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan sinergi antarpihak terkait. Koordinasi yang efektif menuntut adanya penyatuan visi, program, dan sumber daya dalam satu sistem yang terpadu, agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang selaras. Pandangan serupa dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas bekerjanya suatu hukum dan kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan pola hubungan kerja sama antarorganisasi yang beroperasi di dalamnya. Lemahnya koordinasi lintas instansi merefleksikan bahwa struktur kelembagaan yang ada

belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi budaya secara efektif.

Literasi dan Partisipasi Sosial Masyarakat

Aspek sosial kemasyarakatan memegang peranan krusial, di mana efektivitas penggunaan sistem informasi budaya Pasola berbasis website sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan perilaku khalayak dalam mengakses informasi. Bapak Jony J. Langu selaku unsur masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam wawancara tanggal 22 Februari 2026 menjelaskan bahwa tingkat literasi digital masyarakat setempat masih tergolong rendah akibat keterbatasan infrastruktur jaringan internet, bahkan terdapat kelompok warga tertentu yang sama sekali belum mengenal teknologi internet sebagai sarana utama memperoleh informasi. Realitas tersebut berimplikasi pada situs web resmi pemerintah daerah yang belum menjadi pilihan utama publik dalam menggali informasi kebudayaan.

Kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan pola komunikasi tradisional yang telah berakar dalam kehidupan sosial turut memengaruhi rendahnya adopsi teknologi digital. Perolehan informasi mengenai tradisi Pasola umumnya bersumber dari interaksi langsung dengan tokoh adat, anggota keluarga, maupun lingkungan sekitar. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi personal dan kultural terbukti jauh lebih kuat dibandingkan informasi digital yang bersumber dari instansi resmi, sehingga kehadiran situs web pemerintah baru sebatas berfungsi sebagai media pelengkap dan belum mampu menggantikan saluran komunikasi tradisional.

Faktor teknis tata letak visual serta gaya bahasa penyajian informasi turut berkontribusi terhadap minimnya minat kunjung masyarakat pada situs web resmi. Tampilan situs yang kurang menarik serta penggunaan ragam bahasa administratif yang formal dan rumit menyulitkan masyarakat awam dalam memahami isi pesan publik. Tinjauan teori komunikasi digital dari Rulli Nasrullah menekankan bahwa keberhasilan adopsi media digital sangat bergantung pada kemudahan akses, tingkat interaktivitas, serta kesesuaian bahasa dengan karakteristik audiens. Media yang gagal beradaptasi dengan kebutuhan pengguna cenderung ditinggalkan meskipun memiliki kelengkapan fungsi secara teknis. Penggunaan bahasa yang komunikatif, tata letak visual yang menarik, serta penyediaan fitur interaktif menjadi elemen kunci dalam menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan sistem informasi digital. Kerangka teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto memperkuat pandangan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat merupakan determinan penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Rendahnya literasi digital serta kuatnya keterikatan pada tradisi komunikasi lisan merefleksikan bahwa faktor sosial kemasyarakatan memberikan pengaruh signifikan terhadap belum optimalnya pencapaian tujuan pengelolaan sistem informasi budaya Pasola berbasis website.

SIMPULAN

Penyelenggaraan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat telah dijalankan sebagai wujud pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung diseminasi informasi publik serta pelestarian warisan budaya daerah. Pelaksanaan tugas tersebut secara normatif selaras dengan mandat Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016, khususnya dalam lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Platform digital berupa situs web resmi pemerintah daerah telah dimanfaatkan untuk menyediakan informasi dasar mengenai tradisi Pasola, seperti jadwal kegiatan, dokumentasi, dan narasi umum. Optimalisasi fungsi sistem informasi tersebut belum sepenuhnya tercapai karena platform yang beroperasi masih sebatas penyedia informasi statis sederhana, belum dilengkapi fitur interaktif, serta belum bertransformasi menjadi pangkalan data digital yang terstruktur. Efektivitas tata kelola sistem informasi kebudayaan masih menghadapi berbagai hambatan fundamental yang meliputi keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, kendala infrastruktur teknologi, kelemahan sistem pangkalan data, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan sistem informasi budaya Pasola berbasis website di Kabupaten Sumba Barat teridentifikasi ke dalam lima aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan sumber daya manusia, yakni terbatasnya jumlah aparatur berkeahlian khusus di bidang teknologi informasi serta minimnya pemahaman mendalam mengenai konteks muatan budaya lokal. Aspek kedua menyangkut infrastruktur teknologi, berupa terbatasnya alokasi anggaran operasional, minimnya fasilitas pendukung, serta ketidakmerataan akses dan stabilitas jaringan internet di berbagai wilayah. Aspek ketiga berakar pada lemahnya sistem pengelolaan data, di mana proses inventarisasi masih dikelola secara manual dan belum didukung oleh pangkalan data terpadu. Aspek keempat berkaitan dengan kolaborasi antarinstansi yang belum optimal, di mana hubungan kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta lembaga adat masih terbatas pada koordinasi insidental tanpa mekanisme sinergi yang berkelanjutan. Aspek kelima bersumber dari kondisi sosial masyarakat, meliputi rendahnya tingkat literasi digital, kuatnya keterikatan pada tradisi komunikasi lisan secara tradisional, serta minimnya minat kunjung terhadap situs web resmi pemerintah daerah. Seluruh hambatan tersebut membuktikan bahwa problematika operasional sistem informasi budaya Pasola tidak hanya bersifat teknis semata, melainkan melibatkan kompleksitas kelembagaan dan sosial kemasyarakatan yang menuntut perbaikan menyeluruh secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, I Made Wirasna, dan I Ketut Setiawan. “Implementasi Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web untuk Meningkatkan Promosi Wisata Budaya di Bali.” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Atmaja, I Made Wirasna, dan I Ketut Setiawan. *Implementasi Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web untuk Meningkatkan Promosi Wisata Budaya di Bali*. Denpasar, 2020.

Detik Bali. “Tradisi Pasola di Sumba Barat: Sejarah hingga Waktu Pelaksanaan.” 2024. Diakses dari: https://www.detik.com/bali/budaya

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Flew, Terry, dan Richard Smith. *New Media: An Introduction*. Edisi Keempat.

Haba, John. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Hardjaloka, Loura. *Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik*. Jakarta, 2020.

Harian Kompas Cetak. Edisi 23 Maret 2025, Halaman 11.

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Indrajit, Richardus Eko. *Pemerintahan Elektronik: Strategi untuk Pengembangan dan Penyempurnaan Layanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Kompas.id. “Budaya Sumba Tinju Massal Diawasi Aparat dan Medis, Bagaimana Ceritanya.” Diakses dari: https://www.kompas.id/artikel/budaya-sumba-tinju-massal-diawasi-aparat-dan-medis-bagaimana-ceritanya

Melbourne: Oxford University Press, 2018.

Monda, M. J. Y. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pasola di Desa Pero Batang Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya.” *Jurnal Triwikrama*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Monteiro, Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Malang: Setara Press, 2023.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Nugraha, R. P. "Pengembangan Sistem Informasi Kebudayaan Daerah Berbasis Web di Kabupaten Sleman." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis*.

Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Edisi Keenam. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Budaya Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, 2016.

Prasetyo, Bambang, dan Umi Trisyanti. *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*. Jakarta: IPTEK Press, 2019.

Rahardjo, Budi. "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pelestarian Warisan Budaya: Studi Kasus Museum Digital Indonesia." *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 13, No. 2, 2017.

Sedyawati, Edi. *Kebudayaan di Nusantara: Dari Keris, Tor-Tor, sampai Industri Budaya*. Depok: Komunitas Bambu, 2017.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Supriyanto, Wahyu, dan Ahmad Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan: Strategi Perancangan dan Implementasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Wellem, F. D. "Nilai Filosofis dan Makna Ritual Pasola dalam Kehidupan Masyarakat Sumba Barat." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 39, No. 1, 2018.

Wicaksono, Adi, dan Puji Lestari. "Digitalisasi Warisan Budaya melalui Platform Digital: Upaya Meningkatkan Kesadaran Generasi Milenial." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 18, No. 3, 2021.